Analisis Evaluasi
KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH

Dr. H. Rusito, S.Sos., M.Si., CGCAE.

CV. AA. RIZKY

Analisis Evaluasi
KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH

Buku ***Analisis Evaluasi Kebijakan Publik di Daerah*** hadir sebagai referensi penting bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, maupun aparatur pemerintah daerah yang ingin memahami secara mendalam proses evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan, karena melalui evaluasi dapat diketahui sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, hambatan yang dihadapi, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Buku ini menguraikan konsep dasar evaluasi kebijakan, metode yang dapat digunakan, hingga praktik implementasinya di lingkungan pemerintah daerah. Pembahasan mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta pengukuran efektivitas program pembangunan daerah. Selain itu, buku ini juga menyoroti tantangan yang sering muncul, seperti keterbatasan data, kapasitas kelembagaan, dan faktor politik yang memengaruhi hasil evaluasi.

Dengan pendekatan analitis, buku ini mengajak pembaca memahami bagaimana evaluasi bukan hanya alat untuk menilai keberhasilan, tetapi juga sarana memperbaiki kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Disajikan dengan contoh-contoh konkret, buku ini diharapkan mampu menjadi pedoman praktis sekaligus kontribusi akademik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Dr. H. Rusito, S.Sos, M.Si., CGCAE.

Penulis lahir di Cihonje Kabupaten Banyumas, 10 Januari 1971. Pendidikan formal di SDN Cihonje VI Banyumas Jawa Tengah lulus 1985, SMPN Gumelar Banyumas Jawa Tengah lulus 1988, SMAN 2 Sumedang Jawa Barat lulus 1991, Masuk pendidikan Ikatan Dinas Kepamongprajaan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri lulus 1994, S1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Maulana Yusuf Banten lulus 2000, S2 Universitas Krisnadwipayana Jakarta Magister Ilmu Administrasi lulus 2003, dan jenjang Doktor Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, lulus 2017 dengan kajian Administrasi Pemerintahan Desa.

CV. AA. RIZKY

Penerbit : **CV. AA. RIZKY**
Alamat : **Jl. Raya Ciruas Petir,**
Puri Citra Blok B2 No. 34 Pipitan
Kec. Walantaka - Serang Banten
E-mail : *aa.rizkypress@gmail.com*
Website : *www.aarizky.com*

ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelangaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH

Dr. H. Rusito, S.Sos., M.Si., CGCAE.

PENERBIT:
CV. AA. RIZKY
2025

ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH

© Penerbit CV. AA RIZKY

Penulis:
Dr. H. Rusito, S.Sos., M.Si., CGCAE.

Desain Cover & Tata Letak:
Muhamad Aminudin, MP, S.S
Tim Kreasi CV. AA. Rizky

Cetakan Pertama, September 2025

Penerbit:
CV. AA. RIZKY
Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183
Hp. 0819-06050622, Website : *www.aarizky.com*
E-mail: aa.rizkypress@gmail.com

Anggota IKAPI
No. 035/BANTEN/2019

ISBN : …….
xii + 290 hlm, 23 cm x 15,5 cm

Copyright © 2025 pada Penulis dan Penerbit

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PRAKATA

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya dalam hidup kita yang tak terhingga. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita semua. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT penyusunan buku ini dapat diselesaikan dengan judul, Evaluasi Kebijakan Publik di Daerah.

Penyusunan buku ini dilakukan dengan kajian teoritis, yuridis dan empiris. Kajian teoritis dilakukan dengan memilih konsep-konsep colaborative governance, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia. Kajian yuridis dilakukan dengan mendasarkan cara berfikir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada terutama pada undang-undang tentang desa yang lebih menguatkan kebijakan anggaran ke desa. Kajian empiris yaitu dengan studi lapangan berdasarkan pengalaman penulis sebagai praktisi sebagai kepala organisasi perangkat daerah selama berpuluh tahun.

Buku ini disusun dalam rangka memberikan wawasan teoritis, yuridis dan empiris dalam menyusun kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat dan desa seiring dengan kebijakan pengaturan tentang desa yang ditandai dengan menguatnya kewenangan lokal skala desa dan meningkatnya kebijakan anggaran ke desa. Selain itu buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan literatur utama untuk mendukung program studi administrasi publik dengan peminatan administrasi pemerintahan desa. Kajian administrasi pemerintahan desa menjadi peminatan baru seiring dengan kebijakan pemerintah menetapkan undang-undang tentang desa yang sudah berjalan selama kurang lebih satu dasawarsa.

Buku ini menguraikan konsep-konsep yaitu collaborative governance, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,

pengembangan sumber daya manusia, ruang belajar masyarakat. Selain itu menguraikan upaya kolaborasi dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa yaitu evaluasi kegiatan pelatihan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, workshop evaluasi peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa, regulasi peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa, identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat, identifikasi kebutuhan pelatihan pemerintahan desa, pendirian lembaga peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa atas kerja sama antar desa, pendirian lembaga peningkatan masyarakat dan pemerintahan desa atas kerja sama antar desa dan antar daerah dan aktor kolaborasi peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa.

Selain untuk keperluan literatur peminatan administrasi pemerintahan daerah, buku ini layak juga dibaca oleh para penyelenggara pemerintahan desa, pembina pemerintahan desa dan pihak-pihak yang mempunyai kepedulian dalam memajukan desa. Penyusuan buku ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang mendukung secara moril dan materil yaitu pemerintah daerah, kampus, keluarga (istri anak-anak) dan pihak lain yang tidak saya sebutkan satu persatu.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki dan dengan segala kerendahan hati saya bersedia menerima segala masukan baik saran dan kritik yang dapat meningkatkan motivasi saya untuk membuat karya yang lebih baik lagi dikemudian hari. Dan semoga buku ini dapat diterima oleh semua pihak terutama pihak yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan desa dan penentu kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rangkasbitung, September 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
BAB 1 FILSAFAT ILMU ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK 1
A. Pemerintahan 2
B. Filsafat Analisis Evaluasi Kebijakan Publik 9
BAB 2 PENGERTIAN DAN BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH 9
A. Pengertian Kebijakan Publik 26
B. Beberapa Bentuk Kebijakan 34
BAB 3 EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 45
A. Perlunya Evaluasi Kebijakan Publik 45
B. Model Evaluasi 49
BAB 4 KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PARADIGMA ORGANISASI DAN MANAJEMEN PUBLIK KONTEMPORER DALAM PEMERINTAHAN DAERAH 61
A. Pemerintah Daerah Paradigma *Old Public Administration* 64
B. Pemerintah Daerah Paradigma *New Public Management* 72
C. Pemerintah Daerah Paradigma *New Public Service* 82
D. Pemerintah Daerah Paradigma *New Public Governance* 86

BAB 5 EVALUASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH 97
A. Evaluasi Latar Belakang Kebijakan..... 97
B. Pengelolaan Organisasi dan Kegiatan Ruang Belajar Masyarakat .....
C. Penerapan Konsep Ruang Belajar Masyarakat pada Era Undang-Undang tentang Desa 81
BAB 6 EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH 115
A. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik..... 115
B. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Publik..... 121
BAB 7 EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 127
A. Kriteria Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan..... 127
B. Kondisi dan Permasalahan Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan..... 131
BAB 8 KONSEPSI KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK 153
A. Pengertian Kinerja 153
B. Pengukuran Kinerja Pemerintah 157
C. Faktor-faktor Kinerja..... 162
BAB 9 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA..... 175
A. Pemerintahan Desa 175
B. Jenis Pelatihan Pemerintahan Desa 179

BAB 10 PENDIRIAN LEMBAGA PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KERJASAMA ANTAR DESA 195
A. Anggaran Dasar Lembaga Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa 196
B. Anggaran Rumah Tangga Lembaga Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa..... 217
BAB 11 PENDIRIAN LEMBAGA PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ANTAR DESA ANTAR DAERAH 227
A. Regulasi Kerja sama Antar Desa Antar Daerah dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa 228
B. Anggaran Dasar Lembaga Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa Antar Desa Antar Daerah 232
BAB 12 AKTOR KOLABORASI PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 257
A. Aktor Kolaborasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas 258
B. Kolaborasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Sumber APB Desa 271
DAFTAR PUSTAKA 279
TENTANG PENULIS 288

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ilmu-Ilmu Kenegaraan 7
Tabel 3.1 Model Evaluasi menurut Dunn 50
Tabel 3.2 Evaluasi Kebijakan dan Teori yang digunakan 59
Tabel 9.1 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan 180
Tabel 12.1 Peran *Stakeholders* dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa 260
Tabel 12.2 Peran Aktors dalam Program Ketahanan Pangan di Desa..... 274

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ruang Lingkup Pemerin 3
Gambar 1.2 Jembatan Ilmu Politik dengan Ilmu Administrasi Negara 8
Gambar 1.3 Hubungan Administrasi, Organisasi, Manajemen, Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan dan Hubungan Antar Manusia..... 15
Gambar 1.4 Manajemen Pemerintahan Daerah satu Periode Masa Jabatan Kepala Daerah..... 20
Gambar 2.1 Jenis Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 38
Gambar 3.1 Pengawasan Umum dan Teknis menurut PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 47
Gambar 3.2 Evaluasi seluruh Kebijakan 56
Gambar 3.3 Proses Kebijakan 57
Gambar 3.4 Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 58
Gambar 4.1 Orientasi Penggunan Anggaran Daerah..... 62
Gambar 4.2 *Passion* Pimpinan Daerah..... 63
Gambar 4.3 Pemerintah Daerah dengan Paradigma Organisasi dan Manajemen Publik Kontemporer 64
Gambar 4.4 Unsur Organisasi Minztzberg (1993) 66
Gambar 5.1 Konflik Kondisi Sosial dan Perlunya Kebijakan public..... 99
Gambar 5.2 Kondisi Ekonomi..... 100
Gambar 5.3 Public Policy 101
Gambar 5.4 Konflik Sosial..... 102
Gambar 5.5 Model Teori Kelompok 105

Gambar 5.6 Model Teori Elite 106
Gambar 5.7 Isu Kebijakan..... 108
Gambar 5.8 Political System..... 112
Gambar 5.9 Model Deliberatif 113
Gambar 6.1 Perencanaan Strategis..... 119
Gambar 7.1 Teori Organisasi Generasi Keempat Tipe 1 dan Tipe 2 134
Gambar 8.1 Pengaruh Kinerja Individu dan Kelompok terhadap Kinerja Organisasi 169
Gambar 8.2 Satelit Model 170
Gambar 8.3 *Positioning for Future Performance*..... 172
Gambar 9.1 Ruang Lingkup Pemerintahan 176
Gambar 12.1 Pentahelix..... 260